

ARSIP

LAPORAN

KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) SKPD

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH LAUT

TAHUN 2023



SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TANAH LAUT

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Pemda Pelaihari
Kode Pos : 70814
Telp : (0512) 21863-Fax (0512)21009

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Rahmat-Nya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dapat disusun dengan baik.

Adapun tujuan pembuatan LKPJ dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab, transparan, profesional, partisipatif dan akuntabel serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat. Dengan pembuatan LKPJ ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya menjalankan prinsip-prinsip good governance.

Kami menyadari laporan ini belum sempurna seperti yang apa diharapkan mengingat keterbatasan dan kemampuan pada kami, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan demi tersusunnya pelaporan yang lebih baik.

Pelaihari, 5 Januari 2024

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANAH LAUT**

Ir. H. MUHAMMAD MURSYI, M. Si
NIP. 196803041998031009



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Hukum	1
1.2 Visi dan Misi SKPD	3
1.1.1 Strategi dan Arah Kebijakan SKPD	3
1.1.2 Prioritas SKPD dalam Pencapaian Visi dan Misi Daerah	9
BAB II. PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD	12
BAB III. HASIL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	13
3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	13
3.2 Kebijakan strategis yang ditetapkan	27
BAB IV. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	28
BAB V. PENUTUP	29

DAFTAR TABEL

		Halaman
1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023	9
2	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.....	13
3	Pelaksanaan Urusan Unsur Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Lingkup Sekretariat DPRD Tahun anggaran 2023	14
4	Evaluasi Hasil Rencana Kerja Tahun 2023	19

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut disusun dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut

1.2. VISI DAN MISI SKPD

1.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan SKPD

Rencana Strategis Kabupaten Tanah Laut dijabarkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019.

RPJMD Kabupaten Tanah Laut ini telah menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis SKPD untuk tahun 2018 sampai dengan 2023 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran serta target selama periode tersebut.

Visi adalah suatu gambaran jauh kedepan, kemana suatu organisasi/lembaga hendak dibawa. Pernyataan Visi Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2018-2023 adalah :

**“TANAH LAUT BERKARYA, INOVASI, TERTATA, RELIGIUS,
AKTUAL, DAN SINERGI
(BERINTERAKSI)”**

Kata “BERINTERAKSI” pada Visi di atas merupakan singkatan dari frasa: “Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi”. Penjabaran makna dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Berkarya

:

Maknanya adalah bahwa selama periode 2018-2023, para pelaku pembangunan di Daerah Kabupaten Tanah Laut, secara bersama-sama, berkarya mewujudkan tujuan dasar dari pembangunan daerah, yaitu peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.

Inovasi

Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilaksanakan seluruh perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, harus semakin ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat. Inovasi ini berupa terobosan jenis pelayanan yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, inovasi di tingkat kelompok-kelompok masyarakat, khususnya di industri kreatif, juga harus dikembangkan sehingga lebih mampu mandiri dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraannya.

Tertata

Aspek administrasi dan aspek substansi diatur secara tertib dalam sebuah siklus atau proses perencanaan yang semakin berkualitas. Dengan demikian, kualitas perencanaan di perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja harus semakin ditingkatkan secara berkesinambungan.

Relegius

Peran sektor keagamaan harus semakin ditingkatkan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat. Aparatur sipil di tiap perangkat

daerah harus menjadi teladan dan menginspirasi upaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan kemasyarakatan.

Aktual

Penekanan pada aspek aktual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi, dan relevan dengan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat di Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Sinergi

Sinergi dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotong-royongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ego sektoral dan ego bidang harus dihapus dan digantikan dengan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Tagline dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah “**DESA DIBINA, KOTA DITATA**”. Sedangkan motto dalam pencapaiannya adalah “**KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS**”.

Dengan demikian, fokus dari keseluruhan Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah Tanah Laut yang *BERINTERAKSI* pada lokus "DESA DIBINA, KOTA DITATA" melalui "KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS". Fokus pada lokus "DESA DIBINA, KOTA DITATA" adalah karena pada hakikatnya masyarakat berdomisili di wilayah perdesaan dan perkotaan.

Kondisi yang diharapkan dari pembinaan desa dan penataan kota di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah karya nyata dalam wujud peningkatan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan di tingkat perdesaan dan perkotaan.

Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan "**Tanah Laut yang BERINTERAKSI**", maka misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah sebagai berikut:

- BERKARYA** : diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi, yang pada gilirannya nanti meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Daerah Kabupaten Tanah Laut
- INOVASI** : diwujudkan dengan menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif
- TERTATA** : diwujudkan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

- RELIGIUS : diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat
- AKTUAL dan SINERGI : diwujudkan dengan membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023, maka visi Sekretariat DPRD adalah *"Terwujudnya Pelayanan Prima Dalam Upaya Peningkatan Kinerja DPRD Kabupaten Tanah Laut"*.

Untuk mewujudkan visi di atas, maka ditetapkan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran, kualitas pelayanan sarana prasarana, kualitas SDM dan kualitas administrasi kepegawaian;
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan informasi publik, kehumasan dan keprotokolan DPRD;
3. Meningkatnya penyelenggaraan penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan Sekretariat DPRD;
4. Meningkatnya fasilitasi dalam rangka menunjang kinerja DPRD

Berbagai ketentuan yang telah disepakati pihak terkait dan telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Tanah Laut sebagai pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat untuk mempelancar dan memadukan setiap usaha untuk mencapai Visi dan Misi yang telah diuraikan sebelumnya maka

dituangkan dalam bentuk kebijakan. Dengan demikian maka arah kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan dukungan kualitas Pelayanan dalam rangka meningkatkan Kualitas Pelayanan sarana prasarana, kualitas SDM dan kualitas administrasi kepegawaian;
2. Meningkatkan dukungan kualitas penyelenggaraan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan informasi publik, kehumasan dan keprotokolan DPRD;
3. Meningkatkan dukungan penyelenggaraan dalam rangka meningkatkan kualitas penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan Sekretariat DPRD;
4. Optimalisasi dukungan fasilitasi dalam rangka meningkatkan kinerja DPRD.

1.2.2. Prioritas SKPD dalam Pencapaian Visi dan Misi Daerah

Rencana program prioritas SKPD tercantum dalam Rencana Kerja Tahun 2023. Dalam mewujudkan prioritas SKPD, ada 2 program, 15 kegiatan dan 37 sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan/Material

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
	Layanan Administrasi DPRD	Fasilitasi Fraksi DPRD

		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan APBD
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Pelaksanaan Reses
	Fasilitasi Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

BAB II.
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 semula berjumlah Rp. 51.257.055.256.- menjadi Rp 60.812.728.170.- Ada penambahan sebesar Rp. 9.555.672.914.- Dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp.	-	
b. Bertambah/berkurang	Rp.	-	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp.	-
2. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp.	51.257.055.256	
b. Bertambah/berkurang	Rp.	-	
Jumlah belanja setelah perubahan		Rp.	60.812.728.170
Surplus/(defisit) setelah perubahan		Rp.	9.555.672.914
3. Pembiayaan Daerah			
Penerimaan :			
a. Semula	Rp.	-	
b. Bertambah/berkurang	Rp.	-	
Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp.	-
Pengeluaran :			
a. Semula	Rp.	-	
b. Bertambah/berkurang	Rp.	-	
Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp.	-

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Sekretariat DPRD pada tahun 2023 menganggarkan jumlah belanja sebesar Rp. 60.812.728.170.- sebelum perubahan sebesar Rp 51.257.055.256.- Selanjutnya pada pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dengan Realisasi belanja sebesar Rp. 53.337.223.345 ,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar 87,71% dengan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 7.475.504.425.- (12,29%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023
5	BELANJA DAERAH	60.812.728.170	53.337.223.745	87,71
5.1	BELANJA OPERASI	59.830.376.472	52.421.573.745	87,62
5.1.01	Belanja Pegawai	27.920.158.254	25.136.583.483	90,03
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.910.218.218	27.284.990.262	85,51
	JUMLAH BELANJA OPERASI	59.830.376.472	52.421.573.745	87,62
5.2	BELANJA MODAL	982.351.698	915.650.000	93,21
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	815.851.698	750.650.000	92,01
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	166.500.000	165.000.000	99,10
	JUMLAH BELANJA MODAL	982.351.698	915.650.000	93,21

Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3. Pelaksanaan Urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Lingkup Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2023

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	7 dokumen			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36 orang/bulan	36 org x 12 bln			
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 dokumen	5 dokumen			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 paket	2 paket			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 orang	23 orang			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13 paket	13 paket			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3 paket	3 paket			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 paket	2 paket			
				Penyediaan Bahan/Material	1 paket	1 paket			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123 laporan	132 LAPORAN			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
				Pengadaan Mebel	10 paket	10 paket			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 unit	1 unit			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 unit	3 unit			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 bulan x 1 laporan			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 unit	4 unit			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11 unit	11 unit			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Jenis	6 Jenis			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit			
				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					
				Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	35 orang/bulan	35 org x 12 bulan			
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	4 paket	4 paket			
				Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	35 orang	0			
				Layanan Administrasi DPRD					
				Fasilitasi Fraksi DPRD	24 laporan	22 Laporan			
				Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	300 laporan	269 Laporan			
				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD					
				Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 dokumen	1 dokumen			
				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	15 Dokumen	10 dokumen			
				Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	15 Dokumen	10 dokumen			
				Pembahasan Kebijakan Anggaran					
				Pembahasan APBD	3 Dokumen	4 Dokumen			
				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan					
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	6 laporan	3 laporan			
				Peningkatan Kapasitas DPRD					
				Pendalaman Tugas DPRD	140 dokumen	74 dokumen			
				Publikasi dan Dokumentasi Dewan	305 Dokumen	354 dokumen			
				Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	8 orang	8 org x 11 bln			
				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	8 orang	8 org x 11 bln			
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Pelaksanaan Reses	3 dokumen	3 dokumen			
				Fasilitasi Tugas DPRD					
				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	400 dokumen	417 laporan			

Hasil Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2023 untuk Capaian Target Kinerja keseluruhan berdasarkan program dan kegiatan pada tahun 2023 mencapai 197,09 % (sangat tinggi) dan capaian realisasi anggaran 87,71% (tinggi). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Evaluasi Hasil Rencana Kerja Tahun 2023

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2023)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			33.975.270.127		30.528.138.247		89,85%		30.528.138.247
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas* (%)	100	179.715.124	100	150.546.145	100,00%	83,77%	100,00	150.546.145
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun* ()	7	39.715.449	7	24.903.000	100,00%	62,70%	7,00	24.903.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun* ()	3	139.999.675	3	125.643.145	100,00%	89,75%	3,00	125.643.145
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu* (%)	100	5.410.895.931	100	4.810.202.858	100,00%	88,90%	100,00	4.810.202.858
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN* (bulan)	36	5.368.806.098	36	4.775.189.858	100,00%	88,94%	36,00	4.775.189.858

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2023)	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun*) (dokumen)	5	42.089.833	5	35.013.000	100,00%	83,19%	5,00	35.013.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu*) (%)	100	351.054.000	88	293.094.797	88,33%	83,49%	88,33	293.094.797
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*) (stel)	2	57.054.000	2	50.700.000	100,00%	88,86%	2,00	50.700.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*) (orang)	30	294.000.000	23	242.394.797	76,67%	82,45%	23,00	242.394.797
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*) (%)	100	1.427.889.736	100	1.338.113.398	100,00%	93,71%	100,00	1.338.113.398
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*) (unit)	1	47.458.372	1	42.370.000	100,00%	89,28%	1,00	42.370.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*) (unit)	13	698.404.379	13	647.124.000	100,00%	92,66%	13,00	647.124.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan*) (unit)	3	29.881.785	3	25.290.000	100,00%	84,63%	3,00	25.290.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan*) (unit)	2	17.760.400	2	13.264.400	100,00%	74,69%	2,00	13.264.400
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan*) (unit)	1	10.000.000	1	10.000.000	100,00%	100,00%	1,00	10.000.000

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2023)	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* (kali)	123	624.384.800	132	600.064.998	107,32%	96,10%	132,00	600.064.998
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu* (%)	100	105.653.463	100	94.555.000	100,00%	89,50%	100,00	94.555.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan* (unit)	10	77.977.500	10	70.000.000	100,00%	89,77%	10,00	70.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan* (unit)	1	7.907.418	1	6.855.000	100,00%	86,69%	1,00	6.855.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan* (unit)	3	19.768.545	3	17.700.000	100,00%	89,54%	3,00	17.700.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* (%)	100	1.695.753.576	100	1.590.562.324	100,00%	93,80%	100,00	1.590.562.324
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* (bulan)	12	301.000.000	12	296.438.564	100,00%	98,48%	12,00	296.438.564
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor * (bulan)	12	1.394.753.576	12	1.294.123.760	100,00%	92,79%	12,00	1.294.123.760
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara * (%)	100	512.273.875	-	473.351.100	0,00%	92,40%	0,00	473.351.100

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2023)	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara*) (unit)	4	186.435.250	4	185.140.300	100,00%	99,31%	4,00	185.140.300
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara*) (unit)	11	188.370.000	11	185.156.300	100,00%	98,29%	11,00	185.156.300
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara*) (unit)	6	127.478.625	6	94.054.500	100,00%	73,78%	6,00	94.054.500
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara*) (unit)	1	9.990.000	1	9.000.000	100,00%	90,09%	1,00	9.000.000
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Prosentasi pemenuhan Hak Administrasi dan Keuangan Anggota DPRD (100%)	100	23.111.994.981	67	20.725.393.625	66,67%	89,67%	66,67	20.725.393.625
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan DPRD (Tahun)	35	22.551.352.156	35	20.361.393.625	100,00%	90,29%	35,00	20.361.393.625

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2023)	
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya Atribut Pakaian Dinas untuk DPRD dan Sekwan , Tersedianya Pakaian Batik Tradisional untuk DPRD, Tersedianya PDH untuk DPRD dan Sekwan, Tersedianya PSH untuk DPRD, Tersedianya PSL untuk DPRD dan Sekwan , Tersedianya PSR untuk DPRD dan Sekwan (Jenis dan Stel)	4	416.646.825	4	364.000.000	100,00%	87,36%	4,00	364.000.000
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya Medical Check UP DPRD (Orang)	35	143.996.000	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-
Layanan Administrasi DPRD	Prosentasi pemenuhan Terfasilitasinya kegiatan fraksi dan kegiatan rapat DPRD (100%)	100	1.180.039.441	91	1.052.319.000	90,67%	89,18%	90,67	1.052.319.000
Fasilitasi Fraksi DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan)	24	50.140.448	22	42.849.000	91,67%	85,46%	22,00	42.849.000
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Rapat Koordinasi (Kali)	300	1.129.898.993	269	1.009.470.000	89,67%	89,34%	269,00	1.009.470.000
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		99,15%	89,85%		
				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2023)	
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			26.837.458.043		22.809.085.098		84,99%		22.809.085.098
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Prosentasi pemenuhan Terfasilitasinya Proses dan Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD untuk Kemajuan Daerah (100%)	100	4.504.086.816	78	3.674.766.598	77,78%	81,59%	77,78	3.674.766.598
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terfasilitasinya Penerbitan Surat Pertimbangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Tahun)	1	50.701.100	1	33.350.000	100,00%	65,78%	1,00	33.350.000
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah (Raperda)	15	4.443.599.212	10	3.633.074.998	66,67%	81,76%	10,00	3.633.074.998
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terbayarnya Tenaga Ahli Kajian Perundang Undangan (Tahun)	15	9.786.504	10	8.341.600	66,67%	85,24%	10,00	8.341.600
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Prosentasi pemenuhan Terfasilitasinya Proses dan Mekanisme Pembahasan Kebijakan Anggaran sampai dengan Pertanggungjawaban APBD (100%)	100	85.943.726	100	61.887.000	100,00%	72,01%	100,00	61.887.000
Pembahasan APBD	Tersedianya Bahan Pembahasan APBD (Buku)	3	85.943.726	4	61.887.000	133,33%	72,01%	4,00	61.887.000

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2023)	
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentasi pemenuhan Terfasilitasinya Fungsi Pengawasan DPRD (100%)	100	88.426.991	50	45.959.000	50,00%	51,97%	50,00	45.959.000
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Terfasilitasinya Fungsi Pengawasan DPRD Bidang Pemerintahan dan Hukum (Kecamatan)	6	88.426.991	3	45.959.000	50,00%	51,97%	3,00	45.959.000
Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentasi pemenuhan a kualitas Kinerja DPRD secara Profesional dan Terukur yang mewakili Aspirasi Masyarakat Kabupaten Tanah Laut (100%)	100	2.979.628.646	92	2.159.083.997	92,23%	72,46%	92,23	2.159.083.997
Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Kegiatan Bimtek DPRD (Kali)	140	1.777.000.000	74	1.115.008.237	52,86%	62,75%	74,00	1.115.008.237
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi Dewan (Tahun)	305	542.628.646	354	452.575.760	116,07%	83,40%	354,00	452.575.760
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Terbayarnya Honor Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD (Tahun)	8	352.000.000	8	297.500.000	100,00%	84,52%	8,00	297.500.000
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Terbayarnya Tenaga Ahli Fraksi DPRD ,Terpenuhinya Tenaga Ahli Fraksi DPRD (Tahun/Orang)	8	308.000.000	8	294.000.000	100,00%	95,45%	8,00	294.000.000
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Prosentasi pemenuhan Proses dan Mekanisme Penjangkaran Aspirasi Masyarakat Kabupaten Tanah Laut melalui Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut (100%)	100	1.069.223.086	100	768.175.600	100,00%	71,84%	100,00	768.175.600

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2023)	
Pelaksanaan Reses	Terfasilitasinya Kegiatan Reses Anggota DPRD (Kali)	3	1.069.223.086	3	768.175.600	100,00%	71,84%	3,00	768.175.600
Fasilitasi Tugas DPRD	Prosentasi pemenuhan Terfasilitasinya tugas pokok dan Fungsi DPRD (100%)	100	18.110.148.778	100	16.099.212.903	100,00%	88,90%	100,00	16.099.212.903
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi untuk menunjang kinerja DPRD (Tahun)	400	18.110.148.778	417	16.099.212.903	104,25%	88,90%	417,00	16.099.212.903
				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		94,48%	84,99%		
				Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi		
		60.812.728.170		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		97,09%	87,71%		
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		Sangat Tinggi	Tinggi		

3.2. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	Meningkatkan dukungan kualitas pelayanan administrasi Perkantoran, kualitas pelayanan sarana prasarana, kualitas SDM dan kualitas administrasi kepegawaian	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Perkantoran, kualitas pelayanan sarana prasarana, kualitas SDM dan kualitas administrasi kepegawaian
		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	
2	Meningkatkan dukungan kualitas penyelenggaraan informasi publik, kehumasan dan keprotokolan DPRD	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan informasi publik, kehumasan dan keprotokolan DPRD
3	Meningkatkan dukungan penyelenggaraan penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan sekretariat DPRD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan sekretariat DPRD
		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)	
4	Optimalisasi dukungan fasilitasi dalam rangka menunjang kinerja DPRD	Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya fasilitasi dalam rangka menunjang kinerja DPRD
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat	
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota	

BAB IV.
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS
PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut tidak menyelenggarakan Urusan/kegiatan dimaksud.

BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut merupakan pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023. Pencapaian kinerja program dan kegiatan merupakan informasi yang diharapkan dapat diberikan melalui Laporan ini.

Dari uraian pelaksanaan kegiatan tahun 2023 secara umum program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, meskipun dalam pelaksanaan masih ada kendala atau masalah yang dihadapi sehingga pencapaian tujuan kurang maksimal.

Demikian laporan Pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 ini disampaikan. Semoga laporan ini bisa menjadi bahan evaluasi bersama atas program dan kegiatan selama satu tahun dan bisa menjadi tolok ukur dalam menilai kinerja, diharapkan laporan ini bisa menjadi landasan dalam mengambil kebijakan dan langkah-langkah strategis berikutnya. Terimakasih.

Pelaihari, 5 Januari 2024

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANAH LAUT**



Ir. H. MUHAMMAD MURSYI, M. Si
NIP. 19680304 199803 1 009